

EXAMINING KI HAJAR DEWANTARA'S EDUCATIONAL DEMOCRACY IN THE CONTEMPORARY CLASSROOM

MENILIK DEMOKRASI PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA DALAM KELAS KONTEMPORER

Zidane Ardiansyah^{1*}

Hendriwanto²

^{1,2} Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

*Email: zidaneardiansyah@gmail.com

Abstract

This study aims to explore how a teacher interprets and applies Ki Hajar Dewantara's educational democracy in contemporary classrooms. The research employs a qualitative method with a single case study design, where data were collected through open-ended interviews and observations of a teacher applying democratic principles in their classroom. The data were processed using thematic analysis with descriptive coding. The findings reveal four main themes: (1) Democratic Values in Education through Ki Hajar Dewantara's Philosophy, (2) Educational Democracy within the Framework of the Trilogi Kepemimpinan, (3) Innovation in Democratic Education, and (4) The Challenges of Democracy in Contemporary Classrooms. The findings indicate that the instructor sees Dewantara's democratic values as responsible freedom for children to voice their views and equal rights regardless of background. This is accomplished through the Leadership Trilogy, which positions the teacher as a role model, replaces punishment with class agreements, and promotes a good classroom climate. To challenge neoliberalism and neoconservatism in education, the teacher employs democratic concepts such as local methods, experiential learning, and the integration of spiritual dimensions. The obstacles experienced by teachers in implementing educational democracy are related to the ever-changing "kodrat alam" and "kodrat zaman" of pupils, as well as varying perspectives among Tripusat Pendidikan members. However, these difficulties are overcome through reflection and self-improvement.

Keywords: Contemporary Classroom; Educational Democracy; Ki Hajar Dewantara; Leadership Trilogy

Article history: Submission Date: September 13, 2024 Revised Date: December 16, 2024 Accepted Date: December 16, 2024

PENDAHULUAN

Penerapan wajib belajar merupakan fondasi yang mendasar untuk peningkatan kualitas hidup baik dalam peningkatan sosial maupun ekonomi (Kosasih, 2018). Karena inilah setiap individu di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk terus berkembang menjadi individu yang lebih baik (Alpian dkk., 2019). Salah satu tokoh pendidikan nasional yang sangat berjasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara (Widiyanto & Purnomo, 2023). Sosok Ki Hajar Dewantara muncul sebagai tokoh inspiratif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai moral, humanis, demokratis, dan holistik, serta pemberdayaan (Suwahu, 2018; Widyalistyorini dkk., 2023). Sayangnya pendidikan di Indonesia dan bahkan di dunia saat ini masih bersifat neoliberal dan neokonservatif (Stern, 2020).

Menurut Apple (2006) dampak dari neoliberal dan neokonservatif bagi siswa meliputi beberapa hal. Neoliberalisme dalam kelas menekankan kompetisi antar siswa dan evaluasi berbasis tes standar sehingga menimbulkan persaingan, mengabaikan perkembangan holistik siswa, serta nilai-nilai sosial. Sementara itu neokonservatisme menekankan nilai-nilai tradisional, yang seringkali mengontrol kurikulum dengan ketat dan mengajarkan nilai-nilai tertentu yang dianggap benar. Kombinasi kedua ideologi ini membuat keleluasaan guru berkurang dan menekankan pada ujian standar, sehingga menghambat perkembangan berpikir kritis dan kreatif siswa. Oleh karena itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melawan neoliberalisme dan neokonservatisme adalah demokrasi (Apple, 2011).

Demokrasi menurut Ki Hajar Dewantara menekankan pada partisipasi aktif dan kebebasan siswa, menghargai keberagaman, berfokus pada perkembangan holistik, menghargai perspektif lokal, spiritual, dan budaya, serta mendorong hubungan interpersonal yang kuat (Wijaya Mulya dkk., 2022). Dengan berlandaskan demokrasi tersebut, maka nilai-nilai neoliberal dan neokonservatif dapat ditekan. Karena demokrasi memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi dan berinovasi serta mengembangkan karakter dan potensi mereka secara menyeluruh, sehingga nilai neoliberal yang hanya berfokus pada nilai dapat menghilang. Sedangkan nilai neokonservatif dapat dihapus melalui pendidikan yang inklusif di mana tidak adanya hubungan hierarki antara guru dan peserta didik, sehingga setiap siswa dapat dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya tanpa aturan yang kaku.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan solusi alternatif guna menghadapi nilai-nilai neoliberal dan neokonservatif dalam sistem pendidikan terutama dalam ruang lingkup kelas, yang cenderung homogen, individualistik, dan kaku (Gandin & Apple, 2002). Penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan mengintegrasikan praktik serta nilai-nilai lokal, budaya, dan spiritual yang beragam dalam demokrasi pendidikan di kelas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tabrizi (2014) menunjukkan bahwa pendekatan neoliberalisme dan neokonservatisme dalam pendidikan tidak cukup efektif untuk mendidik masyarakat menjadi warga global yang aktif dan mampu. Namun, demokrasi kritis yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan sosial yang dianggap lebih cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fahri dkk (2022) memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis yang dilakukan guru terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara melibatkan mereka dalam proses pembelajaran secara aktif. Meskipun begitu penelitian dari Pribadi (2022) mengatakan bahwa saat ini masih sering dijumpai perbedaan perlakuan bagi siswa yang kaya dan miskin dalam pembelajaran, selain itu siswa masih sering dipandang sebagai objek pembelajaran saja sehingga mereka hanya banyak mendengar tanpa mampu memberikan tanggapan maupun sanggahan. Oleh sebab itu Wijaya Mulya dkk (2022) merekomendasikan pengajaran demokrasi yang lebih mendalam, mencakup keterlibatan kritis dan keadilan sosial. Di Indonesia, pendidikan demokratis dapat diperkaya melalui pendekatan berbasis lokal, pengalaman fisik, dan spiritual, yang menantang dominasi sistem neoliberal dan neokonservatif, serta memperluas pemahaman tentang demokrasi dalam konteks yang lebih holistik dan kontekstual.

Berdasarkan kajian di atas maka penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami lebih mendalam aspek demokrasi yang muncul di dalam kelas. Penelitian terdahulu cenderung membahas aspek demokrasi dalam ruang lingkup partisipasi aktif siswa dan sikap saling menghargai saja, di tambah peran siswa yang masih minim (Khuzaimah & Pribadi, 2022). Padahal demokrasi tidak sesempit itu dan perlu memperhatikan konteks lokal dan budaya. Selain itu penelitian ini akan membahas lebih spesifik lagi dengan memperhatikan aspek demokrasi dalam ruang lingkup kelas. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana cara guru memaknai prinsip-prinsip demokrasi Ki Hadjar Dewantara dalam pembelajaran di kelas? (2) Bagaimana cara guru mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi Ki Hadjar Dewantara dalam pembelajaran di kelas?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Studi kasus tunggal akan berfokus pada suatu masalah, lalu memilih satu kasus untuk menggambarkan masalah tersebut (Creswell, 2007). Studi kasus tunggal dipilih karena penulis ingin mengeksplorasi lebih dalam dan menyeluruh terhadap satu fokus kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan

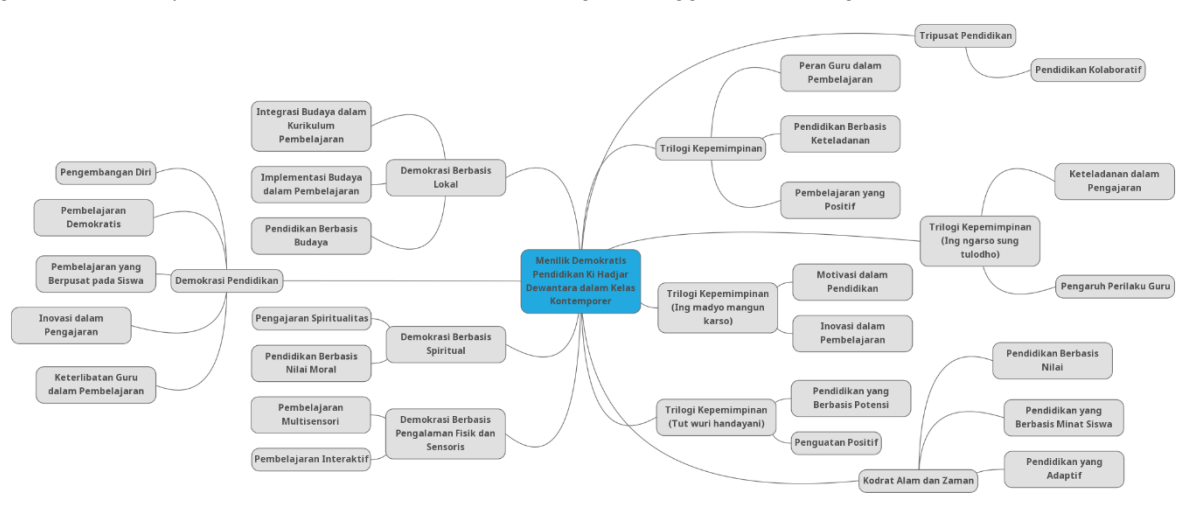
menyeluruh serta mendalam mengenai suatu fenomena (Hollweck, 2015). Sehingga dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana guru memaknai demokrasi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana mewujudkannya di dalam kelas.

Subjek penelitian ini adalah Bu Ratna (nama samaran), seorang guru sekolah dasar yang dipilih karena dinilai konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip Ki Hadjar Dewantara dalam pembelajaran. Penelitian difokuskan pada praktik sehari-hari Bu Ratna di kelas, termasuk cara ia mengelola pembelajaran, membangun hubungan dengan siswa, dan menciptakan suasana kelas yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, dengan begitu peneliti dapat menghasilkan temuan yang kaya dan mendalam tentang pengetahuan dan praktik guru. Dalam penelitian ini subjek memiliki kewenangan untuk menarik diri kapan saja mereka mau (Hendriwanto dkk., 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, spesifiknya adalah wawancara bertipe *open-ended*. Jenis wawancara ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang mendalam berdasarkan pemikiran responden (Sugiyono, 2013). Selain itu, peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang peristiwa yang sedang berlangsung (Hamzah, 2020). Selain wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukungnya adalah observasi kelas melalui *field-note*.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Analisis tematik dilakukan dengan melakukan pengumpulan data di lapangan, setelahnya dilakukan pengolahan data dan hasilnya dibuat dalam bentuk tema-tema (Braun & Clarke, 2006). Untuk memperdalam analisis data digunakan pengkodean deskriptif pada pengolahan data dengan menggunakan tiga jenis pengkodean yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Merriam & Tisdell, 2016). Dalam penelitian ini digunakan pula *member checking* dan triangulasi data (wawancara dan observasi) untuk memverifikasi silang temuan dan memastikan reliabilitas dan validitas data (Maghfiroh dkk., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggali bagaimana guru memaknai demokrasi pendidikan di kelas serta cara guru dalam mengimplentasikannya. Hasil analisis data wawancara dengan menggunakan koding deskriptif didapatkan hasil berikut.



Gambar 1
Peta pikiran analisis data wawancara

Berdasarkan hasil koding tersebut dibuatlah tema-tema untuk menjawab tujuan penelitian ini yang dirumuskanlah dalam 4 tema diantaranya adalah (1) Nilai Demokrasi dalam Kelas melalui Pemikiran Ki Hajar Dewantara (2) Demokrasi Kelas dalam Bingkai Trilogi Kepemimpinan (3) Inovasi dalam Demokrasi Kelas (4) Mengurai Hambatan Demokrasi dalam Kelas Kontemporer.

Nilai Demokrasi dalam Kelas melalui Pemikiran Ki Hajar Dewantara

Demokrasi dalam konteks kelas memiliki pengertian yang beragam dan berbeda-beda. Bu Ratna memiliki pandangan tersendiri terkait apa itu demokrasi serta nilai-nilai demokrasi di dalam kelasnya, Bu Ratna menjelaskan:

Demokrasi itu kan kebebasan ya, arti kebebasan itu sendiri yang sesuai dengan norma. Di demokrasi ini kita belajar bahwa setiap anak harus berpendapat sesuai dengan dirinya. Ketika mereka berpendapat, itu muncul keberanian, keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Setelah mereka mengeluarkan pendapat

dengan berani mereka harus mempertanggungjawabkan pendapat mereka, maka timbullah sikap-sikap tanggung jawab.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Demokrasi pendidikan dalam kelas guru tersebut sudah terwujud dan berjalan dengan baik melalui kebebasan yang diberikan oleh guru. Selain itu guru juga memberikan kesetaraan kepada setiap siswa tanpa melihat latar belakangnya. Pemahaman guru terhadap konsep demokrasi pendidikan tersebut tak lepas dari pengaruh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurutnya demokrasi pendidikan dapat ditemukan utamanya pada konsep Trilogi Kepemimpinan, Bu Ratna menjabarkan:

Nah dari hal tersebut (Trilogi Kepemimpinan) artinya kita sebagai guru ini benar-benar berperan dalam seluruh proses pembelajaran, baik itu dalam memberikan motivasi ataupun pengajaran. Pendidikan dan pengajaran juga itu semuanya ujung tombaknya adalah guru. Kalau gurunya bisa meramu pembelajaran dengan baik, bisa menjadi teman siswa, maka demokrasi pembelajaran pun akan terjadi di dalam kelas dan juga Insyaallah kedepannya akan menuntut anak-anak yang berperan lebih baik lagi di Indonesia.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Dari jawaban tersebut, guru sudah memiliki pemahaman yang baik terkait demokrasi pendidikan, serta nilai demokrasi yang berlandaskan kepada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu guru juga memiliki pemahaman yang matang bahwa kegiatan pembelajaran, termasuk dalam mengintegrasikan demokrasi pendidikan di dalam kelas sangat dipengaruhi oleh peran guru (Fahri dkk., 2022). Kebebasan yang disebutkan Bu Ratna sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kebebasan merupakan suatu hal yang harus diberikan kepada siswa, namun dengan catatan masih mengarah pada kepentingan-kepentingan pendidikan (Ki Hajar Dewantara, 1977). Dengan begitu, kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang memberikan kebebasan dan kesetaraan bagi setiap siswanya mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif, dan akhirnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa dalam menuntut ilmu tanpa melihat latar belakang mereka (Irawan & Hermawan, 2019).

Dengan berlandaskan demokrasi kepada kebebasan dan kesetaraan, Bu Ratna mencoba untuk mengurangi nilai-nilai buruk dari neoliberal dan neokonservatif di dalam kelasnya. Pembelajaran yang mendorong kebebasan siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya bertentangan dengan nilai neokonservatif yang lebih menekankan pada peran utama guru. Sedangkan nilai neoliberal yang berkaitan erat dengan kompetensi, bertentangan dengan nilai kesetaraan Bu Ratna yang memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk semua individu tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap dampak neoliberalis yang memperkuat hierarki di dalam kelas melalui sistem kompetisi dan ranking sekolah, serta neokonservatif yang membatasi kebebasan guru dengan kontrol ketat pada kurikulum dan pedagogi pembelajaran, sehingga menghilangkan fleksibilitas guru (Hill dkk., 2015).

Sementara itu dalam upayanya untuk mengintegrasikan demokrasi pendidikan di dalam kelas, guru menggunakan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama falsafah Trilogi Kepemimpinan. Hal ini lantaran Trilogi Kepemimpinan merupakan konsep kepemimpinan yang demokratis karena memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka masing-masing (Wijaya Mulya dkk., 2022). Dengan begitu tujuan dari Trilogi Kepemimpinan adalah agar kelas menjadi tertib dan damai sehingga dapat mencetak warga negara yang merdeka (Suparti, 2013).

Demokrasi Kelas dalam Bingkai Trilogi Kepemimpinan

Trilogi Kepemimpinan merupakan semboyan yang digunakan pendidikan di Indonesia, semboyan ini terdiri dari "*Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*". Semboyan tersebut merupakan pedoman bagi guru untuk menjadi seorang pendidik serta pengajar yang baik. Bu Ratna memandang falsafah ini sebagai bagian dari caranya membangun demokrasi pendidikan di dalam kelas, pemaknaan ini diutarakan seperti ini:

Yang pertama, ini kan, kalau yang namanya demokrasi berdasarkan trilogi kepemimpinan itu kita mengajarkan siswa bukan dengan hukuman. Tidak boleh ada hukuman di dalam kelas, tetapi adanya kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas ini harus dilaksanakan oleh seluruh siswa dan guru dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tentu yang namanya suri tauladan itu pasti memberikan motivasi kepada siswanya, baik melalui nilai budaya, spiritual, ataupun moral kebajikan, itu tentu harus

ada penerapannya secara keberlanjutan. Yang ketiga juga menciptakan suasa kelas yang positif, kekeluargaan, kemudian tidak lupa juga melakukan refleksi diri serta memberikan kepercayaan kepada siswa untuk melakukan tugasnya dengan penuh kemandirian. Artinya kita itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi penyemangat, dan bisa memberikan motivasi kepada siswa.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Dalam hal ini guru sudah memahami bahwa esensi dari Trilogi Kepemimpinan adalah agar guru mampu menjadi suri tauladan, penyemangat, dan pemberi motivasi bagi siswanya. Lebih spesifik lagi guru menjabarkan bagaimana penerapan ini dilakukan dalam kelasnya dari setiap bagian dari falsafah tersebut. Dalam *Ing ngarso tung tulodho* Bu Ratna menerapkannya dengan menjadi tauladan yang mampu mempraktikkan apa yang sudah disepakati bersama anak didiknya. Bu Ratna mengatakan:

Ing ngarso tung tulodho itu kan artinya di depan memberikan teladan ya, bagaimana kita sebagai guru yang digugu dan ditiru dilihat oleh siswa kelakuan atau tingkah lakunya. Maka kita selama dalam proses pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan apa yang sudah kita sepakati sama anak-anak ... Berarti memberikan teladan itu mempraktikkan secara langsung apa yang sudah disepakati di dalam kelas.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Ing Madya Mangun Karsa yang memiliki arti di tengah memberikan semangat, hal ini menempatkan Bu Ratna dalam posisi untuk selalu mampu memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menarik bagi siswanya, hal ini dilakukan dengan memadukan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, melakukan *ice breaking*, mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab, hingga bermain peran. Tujuan dari Bu Ratna melakukan hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Ing madya mangun karso itu kan semangat, motivasi kepada siswa. ... jadi gimana caranya kita meramu pembelajaran supaya anak-anak lebih semangat terus kemudian anak-anak mampu aktif dalam pembelajaran ... Intinya, tujuannya satu, kebersamaan anak-anak sebagai temannya, yang kedua, supaya anak-anak itu belajar *happy* bukan belajar secara tertekan.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Terakhir dalam menerapkan *Tut wuri handayani* dalam mewujudkan demokrasi di kelasnya, Bu Ratna mengingatkan kepada kita bahwa memberikan dorongan tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, dalam memberikan motivasi serta dorongan kepada siswa harus dilakukan sesuai dengan potensi dan minat mereka. Jelasnya Bu Ratna mengatakan:

Tut wuri handayani itu kan memberikan dorongan kepada siswa. Artinya semua siswa itu terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing ... Sebagai seorang guru kita harus paham dan harus tahu di mana potensi anak, kita memberikan dorongan sesuai dengan potensinya. ... Yang kedua tentu apresiasi kepada siswa secara apa pun dan sekecil apa pun kita berikan apresiasi walaupun dengan tepuk tangan, ataupun *reward-reward* lainnya. Itu bisa menjadikan semangat dan dorongan motivasi siswa untuk tetap belajar.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Trilogi Kepemimpinan merupakan falsafah yang bukan hanya menjadi pedoman bagi guru dalam mengajar, akan tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi siswa (Susanto dkk., 2023). Dalam kasus Bu Ratna, integrasi Trilogi Kepemimpinan dilakukan dengan 3 cara, yaitu menjadi guru yang menempatkan diri sebagai suri tauladan bagi siswa-siswanya, hukuman yang diganti dengan kesepakatan kelas, serta mewujudkan kelas yang positif dan kekeluargaan. Ketiga hal tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan dalam Trilogi Kepemimpinan (Susanto dkk., 2023).

Sebagai suri tauladan, guru mampu mencontohkan dan memotivasi bagaimana mengimplementasikan demokrasi pendidikan bagi siswanya, hal ini akan mendorong siswa untuk berperilaku sesuai yang guru lakukan, karena guru merupakan sumber informasi siswa yang akan mereka tiru (Hutagaol dkk., 2018). Dengan begitu demokrasi pendidikan bagi siswa dapat terwujud bukan hanya melalui praktik langsung, namun juga melalui proses pengamatan kepada guru mereka (Brahma, 2020). Ini berkaitan pula dengan kesepakatan kelas yang dibuat, di mana dengan adanya kesepakatan ini guru dapat menjadi contoh dalam pelaksanaannya. Selain itu kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama dengan siswa, untuk menggantikan hukuman akan mengajarkan siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang

pelajar (Jamaludin dkk., 2023). Hal-hal tersebut akan mewujudkan kelas yang positif dan kekeluargaan karena setiap siswa mampu memahami hak dan kewajiban teman-temannya. Dengan begitu kelas yang positif juga akan terwujud, dan pada akhirnya implementasi demokrasi pendidikan yang dilakukan oleh guru dapat tercapai secara optimal karena kelas berjalan secara efektif dan efisien (Jumrawarsi & Suhaili, 2020).

Selain itu, Bu Ratna mengintegrasikan Trilogi Kepemimpinan dalam praktik sehari-hari di kelasnya dengan pendekatan yang mendalam, yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Pada Ing Ngarsa Sung Tuladha*, guru tidak hanya menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, tetapi juga menjalankan kesepakatan kelas secara konsisten, sehingga siswa memahami pentingnya tanggung jawab dan hubungan saling menghormati. Prinsip demokrasi berupa kebebasan yang bertanggung jawab dan kesetaraan tercermin dalam proses ini, di mana semua siswa memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pendapat dan terlibat dalam pembuatan aturan kelas, dalam prosesnya pun siswa dibentuk untuk menjadi pribadi yang kritis, komunikatif, dan dapat menghargai pandangan orang lain (Cahyani & Pratikno, 2024). *Ing Madya Mangun Karsa* diwujudkan dengan menciptakan pembelajaran yang dapat memotivasi dan mendorong siswa untuk aktif terlibat, ini dilakukan melalui kegiatan seperti diskusi terbuka, *role play*, dan *ice breaking*. Hal ini menempatkan hubungan guru dan siswa pada hubungan kolaborasi tanpa tekanan hierarkis dari guru (Nurwanci dkk., 2024). Sementara itu, *Tut Wuri Handayani* diterapkan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka secara mandiri, disertai apresiasi yang konsisten terhadap segala pencapaian mereka, perlakuan demikian mencerminkan esensi demokrasi dalam bentuk kesetaraan peluang dan penghargaan terhadap keberagaman potensi individu.

Dengan pendekatan ini, Bu Ratna tidak hanya memperkuat hubungan antar siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan kondusif untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa Trilogi Kepemimpinan dapat menjadi kerangka efektif untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi pendidikan, termasuk kebebasan, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam setiap aspek interaksi kelas. Dengan begitu demokrasi pendidikan dapat digapai dengan kecepatan, kearifan, dan kebijaksanaan (Wikansari dkk., 2024).

Inovasi dalam Demokrasi Kelas

Umumnya demokrasi hanya dikaitkan dengan konsep kebebasan dan kesetaraan yang diterima oleh setiap siswa di dalam kelas, namun Bu Ratna memaknai demokrasi pendidikan tidak sesempit itu. Menurutnya demokrasi pendidikan juga harus memperhatikan aspek-aspek yang lain, diantaranya adalah aspek lokal, spritual, dan pengalaman fisik. Aspek lokal atau demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya lokal siswanya, dalam hal ini beliau menjabarkan:

Kalau di pembelajaran sudah memasukkan aspek budaya dan komunitas lokal ... ada muatan lokal yaitu bahasa Cirebon dan Bahasa Sunda. ... Yang kedua juga kita sebagai guru tentunya menerapkan budaya asah-asih-asuh ... Artinya setiap siswa itu satu kelas itu satu keluarga kita tanamkan seperti itu. ... Dan terakhir itu saat pelajaran praktik, ... kita ajarkan nih ada motif geometris yang salah satunya batik, batiknya itu misalkan menggambar mega mendung. Jadi selain belajar sikap, kemudian ada pembelajaran bahasa daerah dan juga keterampilannya.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Selanjutnya guru memasukkan aspek spiritual dalam demokrasi pendidikannya, di sini guru mengajarkan bahwa siswa tidak hanya menghargai dan peduli dengan teman-temannya saja, namun juga kepada lingkungannya. Selain itu guru menekankan bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hari pengadilan kelak sehingga diharapkan siswa memiliki kesadaran akan segala tindakan yang akan dilakukannya. Lebih lengkapnya Bu Ratna mengatakan:

Misalkan tadi pembelajaran berbasis lingkungan kita ajak mereka keluar, mereka mengamati sekitar sekolah dan menyadarkan bahwa semua itu ciptaan Tuhan, kita dasari mereka untuk rasa syukurnya, bahwa semua ciptaan Tuhan harus kita syukuri dan lindungi. ... Kemudian kita juga tanamkan kalau setiap manusia ini amal baik dan buruknya itu selalu dipantau, jadi mereka ada batasan tersendiri dalam bertindak.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Aspek terakhir yang guru praktikkan dalam mengusung demokrasi pendidikan yang lebih luas adalah dengan aspek pengalaman fisik. Pada aspek ini guru mewadahi siswa dengan pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan keinginan mereka, sehingga siswa memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan keinginan mereka, contoh yang guru jelaskan adalah sebagai berikut:

Kalau sensorik dan fisik ya. Kalau sensorik berkaitan dengan panca indra ya. Intinya di kelas itu kita ga hanya melulu dengan melihat, nah kita juga ada menggunakan pendengaran misalkan menggunakan audio cerita. Tapi kalau melakukan biasanya pelajaran IPAS, pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan itu anak-anak turun dan terlibat langsung dengan lingkungannya, misalkan mencari ekosistem di sekolah lalu mengamati jadi mereka bergerak, saat mereka bergerak itu otomatis perhatian dan fokusnya meningkat.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Pembahasan mengenai demokrasi pendidikan seringkali hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggungjawab, mendorong kesetaraan kepada setiap siswa tanpa memandang latar belakangnya, serta meningkatkan partisipasi aktif siswa (Sant, 2019). Namun, pemikiran Ki Hajar Dewantara menginspirasi pandangan yang lebih luas bahwa demokrasi tidak hanya mencakup hal-hal di atas, tetapi juga keterkaitan dengan nilai-nilai lokal, spiritual, dan pengalaman fisik. (Wijaya Mulya dkk., 2022).

Demokrasi yang berlandaskan kepada pendekatan lokal akan menghubungkan siswa dengan tradisi, nilai-nilai, dan budaya setempat, serta mewujudkan kemampuan demokrasi yang sesuai dengan komunitas lokal (Nababan, 2023). Dalam implementasinya, Bu Ratna mengintegrasikan nilai-nilai lokal melalui pengajaran bahasa daerah, penerapan filosofi silih asah-asih-asuh yang menekankan kebersamaan, serta kegiatan praktis seperti pembuatan kerajinan tradisional, termasuk batik motif mega mendung. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan penghargaan terhadap budaya, tetapi juga membantu siswa memahami keadilan sosial dalam konteks lokal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari (Amarulloh & Aswie, 2024). Hal ini mencerminkan pemikiran Dewantara bahwa pendidikan harus menghormati tradisi sambil menyiapkan siswa untuk hidup di masa depan.

Aspek spiritual akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan Tuhan. Demokrasi spiritual akan memperluas pengertian keadilan, kebebasan, perdamaian, kesetaraan, dan hubungan etis dari hubungan antar siswa hingga hubungannya dengan alam semesta dan sang pencipta (Ma'ruf, 2019). Dalam konsep kodrat alam di kelas menurut Ki Hajar Dewantara, aspek spiritual ini juga meliputi kesadaran diri bahwa siswa merupakan bagian kecil dari alam semesta yang sangat luas (Wijaya Mulya dkk., 2022). Dengan begitu Bu Ratna menerapkan aspek ini dengan memulai pembelajaran dengan doa, mengaitkan materi dengan nilai-nilai moral dan spiritual, serta mengajak siswa untuk bersyukur atas ciptaan Tuhan dan menjaga lingkungan. Dalam konteks ini, demokrasi spiritual memperluas makna kebebasan dan keadilan, tidak hanya dalam hubungan antar manusia, tetapi juga dalam hubungan dengan alam semesta dan Sang Pencipta.

Demokrasi berbasis pengalaman fisik juga menjadi elemen penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang menekankan konsep wiraga (fisik), wirama (harmoni), dan wirasa (estetika dan moralitas) dalam pembelajaran (Wiryopranoto dkk., 2017). Bu Ratna mengaplikasikan prinsip ini dengan membagi pembelajaran berbasis pengalaman menjadi dua, yaitu pengalaman sensorik, seperti penggunaan audio dan visual dalam materi, serta pengalaman fisik, seperti observasi langsung ekosistem di sekitar sekolah. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, meningkatkan fokus, dan membangun koneksi antara teori dan praktik. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman kognitif, tetapi juga keterampilan yang relevan untuk kehidupan mereka.

Melalui kombinasi nilai lokal, spiritual, dan pengalaman fisik, demokrasi pendidikan yang diterapkan oleh Bu Ratna memberikan alternatif atas sistem pendidikan yang terlalu kaku dan teoritis. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus holistik, menghormati kodrat siswa, dan mengintegrasikan aspek-aspek budaya, moral, dan fisik untuk membentuk generasi yang merdeka, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Mengurai Tantangan Demokrasi dalam Kelas Kontemporer

Dalam usaha Bu Ratna untuk mewujudkan demokrasi pendidikan di kelasnya tentu tak lepas dari yang namanya tantangan, ini terbagi menjadi tantangan yang datang dari diri sendiri serta dari luar. Oleh karena itu Bu Ratna menjelaskannya berdasarkan sudut pandang dirinya sendiri serta pengalaman guru-guru lain, yang pertama berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, Bu Ratna mengatakan:

Di Ki Hajar Dewantara itu kan ada kodrat alam dan kodrat zaman ya, nah, itu juga sebagai tantangan. Misalnya kodrat alam itu setiap siswa memiliki pembawaannya masing-masing, artinya setiap siswa itu sudah ada kemampuan belajarnya yang ditentukan dari minatnya juga ya ... Yang kedua ada kodrat zaman, artinya kan ada guru yang senior, ada yang masih muda, kalau kodrat zaman kan kita harus melek teknologi ya, jadi mungkin ada guru senior yang perlu pendampingan dari guru yang lebih muda.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan tantangan yang akan selalu dihadapi oleh guru setiap kali mengajar, hal ini tak lepas dari kedua konsep tersebut yang akan berbeda-beda pada setiap siswa dan zaman yang sedang berlalu. Selanjutnya tantangan yang muncul berkaitan dengan pemangku pendidikan lain, yaitu orang tua dan lingkungan, Bu Ratna menerangkan bahwa tripusat pendidikan ini yang terdiri dari orang tua, sekolah, dan masyarakat perlu saling bekerja sama untuk mencapai demokrasi pendidikan yang diinginkan. Hanya saja hal ini kerap kali tidak dapat terlaksana karena aturan yang dibuat di sekolah kadang kala bertentangan dengan aturan di rumah. Oleh karena itu untuk mengatasinya Bu Ratna selalu mengintrospeksi diri, mengadakan pembelajaran yang menarik, berorientasi pada siswa, serta mewujudkan komunikasi yang aktif. Lengkapnya Bu Ratna mengucapkan:

Kalau tantangan yang pasti introspeksi diri dulu, apa yang kurang dari kita kemudian bagaimana caranya memperbaikinya. Misalkan memperbaikinya kemauan, mau belajar, mau bertanya dengan yang lain supaya pembelajaran lebih baik, kemudian mau berubah sebagai motivasi agar berubah menjadi lebih baik, belajar teknologi, atau mengembangkan metode-metode pembelajaran yang membuat siswa semangat *ice breaking*-nya, dan juga mengenal karakter siswa, pembawaan siswa, dan minat bakat siswa.

(Wawancara 5 Agustus 2024)

Tantangan yang dihadapi oleh Bu Ratna dalam menjalankan Demokrasi Pendidikan di kelasnya terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat terjadi dengan kurangnya pemahaman guru dalam menghadapi tantangan kodrat alam dan zaman siswanya, kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara dapat disebut sebagai potensi yang dimiliki oleh seorang anak yang melekat pada dirinya sedangkan kodrat zaman adalah potensi atau minat yang dimiliki oleh seorang anak namun bergantung dengan perkembangan zaman atau budaya sekitarnya (Irianti, 2023). Oleh sebab itu kodrat siswa ini menjadi tantangan yang selalu ada pada guru, bahkan salah satu cara yang harus dilakukan guru dalam menunjang kodrat ini adalah dengan sering kali menggunakan pembelajaran berdiferensiasi (Santika & Khoiriyah, 2023). Sedangkan faktor eksternal berkaitan erat dengan tripusat pendidikan, kerap kali terjadi perbedaan pandangan atau cara yang dilakukan oleh sekolah dan orang tua sehingga pembelajaran yang seharusnya optimal tidak dapat terjadi. Dalam konteks demokrasi pendidikan di sini guru yang menerapkan kebebasan kepada siswanya untuk berpendapat tidak mendapatkan hak yang sama saat di rumah, sehingga pembiasaan ini hanya terjadi di sekolah saja. Padahal keselarasan antara ketiga pihak ini sangat penting terjalin untuk mewujudkan pembelajaran yang diharapkan (Sapdi, 2022).

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut Bu Ratna menyelesaikannya dengan melakukan introspeksi diri dan juga *upgrade* diri agar menjadi pendidik yang lebih berkualitas. Cara ini dilakukan melalui kegiatan mengenal dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan saat mengajar, ingin belajar hal-hal baru yang dapat berguna dalam pembelajaran, menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, serta selalu memiliki motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Kegiatan refleksi ini berguna untuk mewujudkan demokrasi pendidikan karena dengan optimalnya kegiatan implementasi demokrasi di dalam kelas akan berdampak baik untuk siswa, sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang demokratis (Hermawan, 2019).

Secara keseluruhan, tantangan internal dan eksternal yang dihadapi Bu Ratna dalam menjalankan demokrasi pendidikan menunjukkan kompleksitas proses pembelajaran yang demokratis, terutama dalam menghadapi keberagaman kodrat

siswa dan ketidakharmonisan tripusat pendidikan. Meskipun demikian, upaya refleksi diri yang dilakukan oleh Bu Ratna menjadi langkah strategis yang tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga menciptakan ruang bagi siswa untuk berkembang secara holistik (Rahman, 2014). Dengan komitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi, guru dapat mengatasi hambatan yang ada dan memastikan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan tanggung jawab tetap tertanam dalam setiap aspek pembelajaran. Keberhasilan demokrasi pendidikan ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak yaitu guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, suportif, dan kontekstual bagi siswa sebagai calon warga negara yang kritis dan demokratis.

Demokrasi pendidikan yang diterapkan di kelas Bu Ratna menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan filsafat lokal Indonesia, yaitu berdasarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memperkaya perspektif demokrasi pendidikan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Selain nilai lokal, terdapat juga nilai spiritual dan pengalaman fisik yang memperluas perspektif demokrasi kelas secara lebih luas. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan demokrasi pendidikan di kelas-kelas modern dengan menawarkan wawasan praktis dan inovatif. Pendekatan yang diterapkan Bu Ratna, seperti integrasi nilai-nilai lokal, spiritualitas, dan pengalaman fisik, menunjukkan bahwa demokrasi pendidikan dapat dilaksanakan secara kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaan lokal. Selain itu, studi ini menyoroti pentingnya peran refleksi guru dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal, khususnya dalam menyelaraskan pembelajaran dengan kodrat siswa dan tuntutan zaman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan solusi praktis untuk guru dalam menerapkan demokrasi di kelas, tetapi juga menjadi referensi penting untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis budaya lokal di era pendidikan saat ini.

KESIMPULAN

Guru memaknai prinsip-prinsip demokrasi Ki Hadjar Dewantara dalam kelasnya sebagai kebebasan bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan bertanggung jawab, serta menyetarakan hak setiap siswa tanpa memandang latar belakangnya. Demokrasi pendidikan ini tercermin dalam ajaran Ki Hajar Dewantara melalui falsafah Trilogi Kepemimpinan yang berlandaskan kepada kebebasan dan kesetaraan bagi siswa. Implementasi ini dilakukan oleh guru dengan cara menempatkan diri guru sebagai suri tauladan bagi siswa, peniadaan hukuman yang diganti dengan kesepakatan kelas, serta mewujudkan kelas yang positif dan kekeluargaan. Selain itu guru juga memiliki inovasi dalam mewujudkan demokrasi pendidikan melalui pendekatan lokal, pengalaman fisik, dan aspek spiritual. Meskipun menghadapi tantangan yang akan selalu ada yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta tripusat pendidikan siswa, guru mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan melakukan refleksi dan memperbaiki kekurangan diri. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya pelatihan guru untuk memahami kodrat alam dan kodrat zaman siswa, penggunaan metode pembelajaran yang inklusif dan beragam, serta kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang demokratis, relevan dengan kebutuhan zaman, dan mampu mencetak generasi yang kritis, kreatif, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan keterbaharuan perspektif demokrasi pendidikan di kelas kontemporer serta menawarkan inovasi demokrasi pendidikan yang berlandaskan kepada budaya lokal, pengalaman fisik, serta aspek spritual untuk melawan nilai-nilai neoliberal dan neokonservatif yang buruk bagi perkembangan siswa. Diharapkan pula penelitian selanjutnya dapat memotret lebih banyak lagi inovasi-inovasi demokrasi pendidikan di Indonesia.

REFERENSI

- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurna Buana Pengabdian*, 1(1), 66–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.581>
- Amarulloh, R. R., & Aswie, V. (2024). Internalization of Sundanese Local Wisdom in Strengthening the Profile of Pancasila Students through the Literacy Movement in Madrasah. *JENTRE*, 5(1), 17–27. <https://doi.org/10.38075/jen.v5i1.478>
- Apple, M. W. (2006). Understanding and Interrupting Neoliberalism and Neoconservatism in Education. *Pedagogies: An International Journal*, 1(1), 21–26. https://doi.org/10.1207/s15544818ped0101_4
- Apple, M. W. (2011). Democratic education in neoliberal and neoconservative times. *International Studies in Sociology of Education*, 21(1), 21–31. <https://doi.org/10.1080/09620214.2011.543850>
- Brahma, I. A. (2020). Peranan Kepala Sekolah dalam Menumbuhkan Sikap Demokrasi Guru di SDN Mekarjaya 31 Depok. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 12(1), 61–69. <https://doi.org/10.37640/jip.v12i1.169>

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cahyani, I. W. N., & Pratikno, A. S. (2024). Penerapan Metode Diskusi dalam Upaya Penanaman Pendidikan Karakter melalui Kesepakatan Kelas VI B UPTD SDN Kamal 2. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43176–43182. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27927378>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* Creswell (2 ed.). Sage.
- Fahri, F., Lubis, M. J., & Darwin, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Demokratis Guru pada Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3364–3372. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2616>
- Gandin, L. A., & Apple, M. W. (2002). Thin versus thick democracy in education: Porto alegre and the creation of alternatives to neo-liberalism. *International Studies in Sociology of Education*, 12(2), 99–116. <https://doi.org/10.1080/09620210200200085>
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Studi Kasus Single Case, Instrumental Case, Multicase & Multisite*. Literasi Nusantara.
- Hendriwanto, Mahaputri, R. A., Basthomi, Y., & Khoiri, N. El. (2022). Learning How to Re-Mean: Developing Paraphrasing Materials from an SFL Perspective. *Journal of Asia TEFL*, 19(1), 291–302. <https://doi.org/10.18823/asiatefl.2022.19.1.21.291>
- Hermawan, C. M. (2019). Refleksi Guru dalam Melakukan Penelitian Tidakan untuk Meningkatkan Keberhasilan Siswa. *MUALLIMUNA: JURNAL MADRASAH IBTIDAIYAH*, 4(2), 78–91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/muallimuna.v4i2.1862>
- Hill, D., Lewis, C., Maisuria, A., Yarker, P., & Carr, J. (2015). Neoliberal and Neoconservative Immiseration Capitalism in England: Policies and Impacts on Society and on Education. *Journal for Critical Education Policy Studies*, 14(2), 38–82.
- Hollweck, T. (2015). Robert K. Yin. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). . *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 108–110. <https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>
- Hutagaol, K., Saija, L. M., & Simanjuntak, D. C. (2018). Model Pembelajaran Kooperatif Ing Ngarsa Sung Tuladha. *Jurnal Padagogik*, 1(2), 89–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.35974/jpd.v1i2.659>
- Irawan, I., & Hermawan, D. (2019). Konseptual Model Pendidikan Demokratis Perspektif Pendidikan Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 626–631. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5254>
- Irianti, R. I. (2023). Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Pengimplementasian Pendidikan yang Sesuai dengan Kodrat Alam dan Zaman. *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/ptk.v1i2.56>
- Jamaludin, Wahyudi, A., Batu, D. P. L., & Sihalohe, O. A. (2023). Praktik Baik Demokrasi Berkarakter Melalui Proyek Profil Pelajar Pancasila di SMA Gajah Mada Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 166–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7639>
- Jumrawarsi, & Suhaili, N. (2020). Peran Seorang Guru dalam Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif. *Ensiklopedia Education Review*, 2(3), 50–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eer.v2i3.628>
- Ki Hajar Dewantara. (1977). *Karya Ki Hadjar Dewantara: Pendidikan. Bagian pertama*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. <https://books.google.co.id/books?id=oX1dmgEACAAJ>
- Khuzaimah, & Pribadi, F. (2022). Penerapan Demokrasi Pendidikan pada Pembelajaran Siswa di Sekolah Dasar. *AL MA'ARIEF: JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA*, 4(1), 41–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/almaarief.v4i1.2176>
- Kosasih, E. (2018). Partisipatory Action Research (Par) Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Serang. *JIPAGS*, 2, 323–347. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31506/jipags.v2i2.4880>
- Maghfiroh, M., Iryani, E., Turhan Yani, M., Zaini, N., & Mahfud, C. (2024). Promoting Green Pesantren: Change, Challenge and Contribution of Nahdlatul Ulama in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7, 409–435. <https://doi.org/10.31538/nzh.v7i2.4668>
- Ma'ruf, M. (2019). Mengarahkan Demokrasi Pancasila (Relasi Demokrasi, Ekonomi, dan Politik). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 8(2), 87–101.

- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Nababan, K. R. (2023). Mandok Hata Sebagai Pendidikan Demokrasi dalam Kebudayaan Batak. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 23–40. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a2>
- Nurwanci, S., Muhtar, T., & Herlambang, Y. T. (2024). Demokrasi Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, Studi Kritis dalam Tinjauan Pedagogik. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(1), 546–554. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i1.1324>
- Pribadi, F. K. (2022). Penerapan Demokrasi Pendidikan pada Pembelajaran Siswa di Sekolah Dasar. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(1), 41–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/almaarief.v4i1.2176>
- Rahman, B. (2014). Refleksi Diri dan Peningkatan Profesionalisme Guru. *Jurnal Paedagogia*, 17(1), 1–12. <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/paedagogia>
- Sant, E. (2019). Democratic Education: A Theoretical Review (2006–2017). *Review of Educational Research*, 89(5), 655–696. <https://doi.org/10.3102/0034654319862493>
- Santika, I. D., & Khoiriyah, B. (2023). Pembelajaran Berdiferensiasi dan Relevansi Visi Pedagogis Ki Hajar Dewantara dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 4827–4832. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11754>
- Sapdi, R. M. (2022). Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Tri Pusat Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 649–656. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7084119>
- Stern, J. (2020). The Real Reason Neoliberalism Became Extinct: A Curious Educational History of 2020. *Forum*, 63(3), 477–487. <https://doi.org/https://doi.org/10.15730/forum.2020.62.3.477>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparti, W. (2013). *Implementasi Trilogi Ki Hajar Dewantara Dalam Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMA Taman Madya Ibu Pawayatan Yogyakarta* [Skripsi Thesis]. UIN Sunan Kalijaga.
- Susanto, E. W., Kirana, K. C., & Hadi, S. (2023). Pengaruh Keadilan Organisasi, Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara Terhadap Motivasi Berprestasi Melalui Lingkungan Kerja Fisik. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 8(1), 21–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.31932/jpe.v8i1.2165>
- Suwahyu, I. (2018). Pendidikan Karakter Dalam Konsep Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(2), 192–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2290>
- Tabrizi, S. (2014). Connections between Neo-Liberalism, NeoConservatism, and Critical Democracy in Education. *International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education*, 4(Special 1), 1922–1929. <https://doi.org/10.20533/ijcdse.2042.6364.2014.0267>
- Widiyanto, S., & Purnomo, B. (2023). Freedom to Learn in Ki Hajar Dewantara's Perspective: Historical Studies and Their Relevance to Character Education. *International Journal of Business*, 4(2), 837–844. <https://doi.org/https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.185>
- Widyalistyorini, D., Faroh, N. I., & Hendratno. (2023). Implementasi Teori Pendidikan Ki Hajar Dewantara: Tinjauan Praktik Pembelajaran dan Dampaknya pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/84nhq902>
- Wijaya Mulya, T., Sakhiyya, Z., Bukhori Muslim, A., & Suryani, A. (2022). Locally-grounded, embodied, and spiritual: exploring alternative constructions of democratic education with/in Indonesian schools. *Pedagogy, Culture and Society*. <https://doi.org/10.1080/14681366.2022.2142840>
- Wikansari, A., Nisa, D. A., Respita, A. V., Rahmawati, P., Jati, A. M., & Safitri, S. (2024). Peran Guru Dalam Membentuk Jiwa Kepemimpinan Siswa Melalui Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. *Jurnal PGSD Universitas Lamappapoleonro*, 2(2), 74–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.57093/jpgsdunipol.v2i2.37>
- Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D., & Tangkilisan, Y. B. (2017). *Ki Hajar Dewantara "Pemikiran dan Perjuangannya"*. Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.